

BAB II.

KAJIAN TEORI

II.1 TINJAUAN PEDAGANG KAKI LIMA

II.1.1 Motivasi Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Permasalahan PKL dalam konteks urban mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi yaitu:

- 1). *Aspek legal*, tidak adanya perlindungan hukum dan legalitas
- 2). *Aspek ekonomi*, modal kecil dan operasional sederhana
- 3). *Aspek fisik*, menempati lokasi strategis, ruang publik, *temporer*¹⁹, dan tanpa ijin. (Waworoentoe, 1974 et al dalam Ikaputra dan Agus N, 2003, dalam Vincentia Reni Vitasurya, 2004)

Multiple effect yang terjadi akibat krisis ekonomi mengakibatkan kehancuran besar bagi dunia konglomerasi Indonesia dan melahirkan generasi baru dengan status pengangguran. Ketidakseimbangan antara besarnya tenaga kerja dan kesempatan kerja melahirkan inisiatif baru, salah satunya menjadi pedagang kaki lima (Hidayat, 2001, dalam Tesis dengan judul *Penataan PKL di Kawasan Taman Ria Palu* oleh Muhammad Bakri, 2000).

Motivasi yang kuat dari para PKL telah membuat aktivitas informal tersebut berpengaruh pada aktivitas formal yang sesungguhnya, bahkan terjadi hubungan diantara keduanya.

¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Jakarta, 203) hlm. 1169, "*temporer*" berarti untuk sementara waktu; sementara; darurat.

II.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Aktivitas Formal dan Aktifitas Non Formal (PKL) di Ruang Jalan

Hubungan mengenai aktivitas formal dan informal dipaparkan dalam sebuah penelitian berupa Tesis dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Aktivitas Formal dan Aktivitas Informal di Ruang Jalan Jendral Sudirman, Salatiga (*Vincentia Reni Vitasurya, 2004*). Dari hasil pengamatan yang dilakukan di beberapa penggal jalan Jendral Sudirman di Kota Salatiga, didapat sebuah kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut, yaitu:

1). *Aktivitas komersial perdagangan konsentris*

Pusat aktivitas komersial dagang berupa pasar tradisional merupakan magnet aktivitas komersial bagi masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan intensitas aktivitas di area pusat ini sangat padat, sehingga memicu pertumbuhan PKL dalam jumlah intensitas yang besar.

2). *Aktivitas komersial dagang linier*

Emperan atau setfront dari toko menjadi area mangkal bagi PKL. Karakter aktivitas komersial dari fungsi formal berpengaruh pada karakter PKL yang mangkal di depannya, terutama komoditi barang dagangan, karakter serta posisi tempat berdagang.

3). *Akses masuk kawasan*

Akses melintas kawasan mempengaruhi posisi mangkal PKL.

4). *Waktu operasional*

Waktu operasional PKL akan menyesuaikan dengan waktu operasional aktivitas formal yang ada di belakangnya.

5). *Variasi pengguna ruang jalan*

Dengan adanya variasi pengunjung, maka *segmentasi*²⁰ konsumen bagi PKL juga akan terpengaruh.

Hubungan antara aktivitas informal dan formal tersebut akhirnya akan menimbulkan beberapa permasalahan pada ruang-ruang formal terbuka kota, diantaranya taman kota dan alun-alun.

II.2 RUANG TERBUKA KOTA

II.2.1 Ruang Terbuka dan Permasalahannya

Alvin Dwi Antoro et al.-, mencoba meneliti untuk melakukan gambaran eksisting fisik maupun non fisik yang ada di alun-alun kidul Jogjakarta. Penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan pada *legibilitas* ruang terbuka yang berkaitan dengan kenyamanan penggunaannya, maksudnya adalah kemampuan suatu tempat untuk mengkomunikasikan tempat tersebut terbuka untuk pengguna dan apa yang mungkin dilakukan pengguna di dalamnya (Carr, Francis, Rivlin, Stone, 1992). Dari penelitian tersebut diketahui masalah-masalah pokok yang terjadi di alun-alun kidul Jogjakarta, yaitu:

²⁰ Ibid, hlm. 1011, segmentasi berarti pembagian dalam segmen; pembagian struktur sosial ke dalam unit-unit tertentu yang sama.

- 1). Masalah sosial, yaitu masalah *ciblek*. Ciblek adalah golongan masyarakat yang berusia remaja yang melakukan aktifitas seksual dengan atau tanpa imbalan, sesuai keinginannya.
 - 2). Masalah ekonomi, yaitu masalah setting pedagang yang belum tertata.
 - 3). Masalah lingkungan, yaitu masalah orientasi sirkulasi yang tidak jelas, masalah parkir yang tidak tertata, dan masalah fasilitas penunjang seperti tempat sampah, kamar mandi, tempat duduk, dll.
- Permasalahan tersebut di atas dijadikan acuan dalam rangka penataan ulang alun-alun kidul Jogjakarta. Hanya saja penelitian ini tidak mencoba mengkaitkan antara alun-alun kidul Jogjakarta dengan lingkungan sekitarnya.

II.2.2 Karakter Serta Fungsi Alun-Alun

Sebuah wacana dengan judul *Menggugat Ke-Alun-Alun-an Sebuah Alun-Alun* yang ditulis oleh Santy Marlina, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, dkk. mempertanyakan tentang apa, bagaimana, dan bilamana ke-alun-alun-an dari sebuah alun-alun. Pertanyaan-pertanyaan di atas mengarah pada aktifitas yang terjadi di dalam sebuah alun-alun. Jika kita berbicara tentang alun-alun Malang, maka terlintas suatu karakter yang sangat berbeda antara alun-alun Persegi dengan alun-alun Bundar. Perbedaan ini terlihat pada aktifitas yang diwadahi oleh kedua alun-alun tersebut. Jika pada alun-alun Persegi lebih ditonjolkan pada kegiatan sosial ekonomi (PKL, parkir kendaraan, hiburan, dll.), maka pada alun-alun

Bundar terdapat suatu pemandangan yang terbalik yaitu lebih menonjolkan alun-alun sebagai sebuah land mark di dalam taman kota yang dijadikan titik orientasi bangunan di sekitarnya. Berdasarkan jelajah konsep kasus dan potret terhadap kedua alun-alun tersebut, ditemukan suatu kenyataan bahwa aturan atau norma yang berlaku di masyarakat baik formal (sebagai kesepakatan wakil rakyat dengan penguasa) maupun non formal (adat kebiasaan yang diwarisi secara turun - temurun) memegang kekuasaan tertinggi sebagai posisi yang paling menentukan untuk menilai kealun-alunannya. Pada intinya yang berhak menilai kealun-alun-an dari sebuah alun-alun adalah para pelaku di dalamnya yang terdiri atas pengunjung dan pedagang kaki lima (PKL).

II.2.3 Taman Kota

Taman kota merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, lengkap dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi aktif maupun pasif. Dalam hasil penelitian Penyusunan Rencana Umum Pertamanan Propinsi Bali disebutkan bahwa komponen-komponen yang digolongkan dalam pengertian taman kota diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Taman halaman terdiri dari halaman rumah tinggal, halaman kantor, halaman bangunan khusus (tempat ibadah, rumah sakit, kampus, dll.)
- 2). Tempat rekreasi kota atau bermain yang mencakup taman lingkungan perumahan, taman lingkungan suatu wilayah kota, kebun binatang

dll.

- 3). Komplek olahraga .
- 4). Taman monument.
- 5). Ruang terbuka yang berfungsi ganda, seperti alun - alun, plaza, pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan.

Untuk pendekatan perencanaan sebuah taman kota yang sekaligus juga berarti ruang publik, dapat didekati dari pandangan Stephen Carr (1992) yang menyatakan bahwa tiga dimensi kemanusiaan yang sangat penting harus tercermin dalam ruang publik. Tiga dimensi itu meliputi:

- 1). *Responsif*, ruang publik harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan warganya.
- 2). *Demokratis*, ruang publik yang dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta bagi para difabel, lansia dan berbagai kondisi fisik manusia.
- 3). *Bermakna*, ruang publik harus memiliki tautan dengan masyarakat , lingkungannya, serta dunia luas.

(Salain Putu Rumawan, dalam “ *Menata Taman Kota Denpasar* “)

Selain taman kota dan alun-alun, dampak keberadaan aktivitas informal tersebut juga dirasakan pada jalan-jalan tempat aktivitas informal tersebut dilakukan.

II.3 PERMASALAHAN RUANG JALAN

Dalam sebuah wacana yang ditulis oleh Anas Hidayat dengan judul *Pergulatan Identitas di Ruang Jalan* dipaparkan permasalahan mengenai perubahan makna sebuah ruang jalan dari *Public-Pure Space* menuju *Independen - Hybrid Space* dengan kasus bazar di Tunjungan, Surabaya. Jalan biasanya dipahami sebagai suatu fasilitas umum untuk tempat lalu lintas kendaraan ataupun pejalan kaki. Jika dilihat dari sudut pandang spasial, jalan merupakan sebuah ruang. Ruang jalan ini tidak hanya menunggu untuk dimaknai dari luar, melainkan juga ingin mendapatkan makna dari dan di dalam dirinya secara independent. Dengan demikian, ruang jalan juga memiliki kekuatan yang baru untuk memberi makna pada kepada realitas lain di luarnya. Bazar jalanan oleh PKL di Tunjungan Surabaya sebagai salah satu teks yang memberi makna baru pada ruang jalan sebenarnya merupakan sebuah realitas yang *ambigu*²¹ dan *hybrid*²² Bazar ini adalah aktivitas yang hanya menumpang dan tidak melekat kuat di jalan, seperti sosok hantu yang bisa hilang di satu tempat dan muncul di tempat lain. Sifat menghantu (spectral) ini sebenarnya merupakan kekuatan laten bagi bazaar jalanan

²¹ Ibid, hlm. 36, ambigu artinya bermakna lebih dari satu (sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan); bermakna ganda

²² Pengertian hybrid; Hybrid pada dasarnya merupakan istilah biologi. Di dalam Webster's New Collegiate Dictionary, hybrid didefinisikan sebagai ".....keturunan dari dua hewan atau tanaman yang berasal dari ras, jenis, spesies, atau genetic yang berbeda". Hibridisasi adalah proses perkawinan silang antara dua jenis spesies tersebut. Perkawinan silang ini juga terdapat pada biologi molecular, yaitu melalui proses menghubungkan secara bersama-sama molekul-molekul DNA untuk menghasilkan efek baru. (lihat Piliang 1998: 176)

untuk melawan kekuatan paradigma penindas yang berusaha menggusurnya keluar dari ruang jalan kota. Di dalam diri bazaar jalanan itu pun sedang terjadi krisis serta pergulatan identitas. Di satu pihak, bazaar itu ingin diakui sebagai salah satu aktifitas di ruang jalan kota Surabaya, sementara di pihak lain masih membawa sisa-sisa identitas asli pasar lokal-tradisional yang membuatnya tidak bisa diterima sepenuhnya oleh budaya global kota. Pergulatan identitas yang hybrid seperti ini adalah sebuah proses kreatif karena pada dasarnya tidak ada lagi identitas murni, setiap identitas adalah proses hibriditas yang terus menerus. Wacana ini cukup menarik hanya saja di dalamnya tidak diberikan solusi terhadap pergulatan identitas ruang jalan tersebut.

Dalam melakukan observasi terhadap aktivitas informal tersebut serta kawasan yang dipakai sebagai tempat melakukan aktivitas, baik di taman kota, alun-alun, maupun yang berada di ruang jalan, perlu diketahui beberapa teknik membaca perilaku dari para PKL tersebut.

II.4 TINJAUAN PERILAKU

II.5.1 Teknik Membaca Perilaku

J. Vredenburg dalam bukunya yang berjudul *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* mengungkapkan bahwa salah satu metode pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi terhadap objek penelitian. Adapun beberapa teknik observasi diantaranya, yaitu:

1). Teknik observasi-partisipasi

Peneliti dalam menerapkan teknik ini memainkan peranan

sebagai partisipan atau peserta dalam suatu kebudayaan. Identitas yang sesungguhnya tidak diketahui oleh para responden dan informan. Peranan yang dimainkannya bersifat pura-pura dan semata – mata dengan tujuan untuk melalui partisipasi dalam kultur tersebut mencari data-data ilmiah yang dibutuhkan.

2). *Teknik observasi saja*

Pada teknik ini, interaksi sosial dengan para informan sama sekali tidak terjadi. Bentuk observasi ini hanya dapat dipakai jika pengetahuan peneliti mengenai masalah yang ingin diteliti sudah cukup luas. Pengetahuan yang mendalam memberi kesempatan kepada peneliti untuk sebelumnya merumuskan kategori – kategori yang akan dipakai untuk menganalisa apa yang diobservasikan.

3). *Teknik partisipasi terbatas*

Peneliti tidak menyembunyikan identitas sesungguhnya dan berusaha untuk memperkembangkan rapport yang baik dengan para responden. Peneliti melalui teknik ini, baik melakukan observasi formil melalui suatu proses wawancara didasarkan atas daftar – daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, maupun berpartisipasi dalam beberapa kegiatan responden.

4). *Teknik observasi terbatas*

Teknik observasi ini didasarkan atas kunjungan saja untuk mengadakan wawancara. Jelaslah bahwa teknik ini hanya

mengenal interaksi dengan para informan atau *responden*²³ secara terbatas sekali. Penelitian melalui teknik ini menemukan sejumlah besar responden tanpa ada kemungkinan untuk mengembangkan rapport yang baik dan kemungkinan akan timbulnya salah persepsi selalu besar.

II.5.2 Perilaku Dalam Ruang Publik

Landasan yang harus ditetapkan dalam perencanaan dan perancangan suatu kawasan yang melibatkan pelaku publik, yaitu (*Heimsath, 1977*) :

- 1). Kebutuhan dari owner (masyarakat, publik, pemerintah)
- 2). Aturan pengarah dari pemerintah
- 3). Pengalaman dan wawasan perancang yang diekspresikan dalam desain.

Dari ketiga hal di atas, maka aspek perilaku dari masyarakat sebagai bagian dari yang akan dilayani oleh desain ini sangat dibutuhkan . Salah satu yang dapat dilakukan dalam penelitian awal sebelum perencanaan dan perancangan suatu kawasan publik berdasarkan aspek perilaku tersebut adalah :

- 1). *Mendalami pola perilaku masyarakat*

Hal ini sangat terkait dengan kultur dan kebiasaan masyarakat setempat yang khas di masing - masing lokasi.

Pengamatan kultur dan kebiasaan ini menjadikan hasil desain yang

²³ Ibid¹², hlm. 952, *responden* adalah penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian)

husus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

2). *Aktivitas yang terjadi dan dilakukan masyarakat*

Secara umum, aktivitas yang dilakukan masyarakat di ruang jalan sebagai ruang publik terbagi menjadi aktivitas linier (aktivitas yang bergerak dan dinamis) dan aktivitas non linier (cenderung menetap di suatu point tertentu).

3). *Latar belakang dan tujuan*

Mencakup definisi dari apa yang ingin dicapai untuk masa yang akan datang, dengan melihat perilaku masyarakat dan kecenderungan yang terjadi. Dengan tujuan yang mendasar yaitu perbaikan kualitas hidup masyarakat.

4). *Ruang sebagai bahasa visual*

Sebagai media perwujudan desain berupa ruang yang akan dipergunakan sebagai setting aktivitas (bahasa visual) yang disampaikan perancang sebagai hasil terjemahan interaksi dari aktivitas masyarakat dengan ruang pewardahan (settingnya).

(*Vincentia Reni Vitasurya, 2004*)

II.5 ELEMEN URBAN DESAIN

II.5.1 Pedestrian Sebagai Elemen Urban Desain

Sasaran pokok dari suatu program peningkatan untuk pejalan kaki adalah keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesinambungan, pertalian, dan daya pikat.

1). *Keselamatan pejalan kaki*

Cara pertama untuk meningkatkan keselamatan bagi pejalan kaki adalah penghapusan atau pengurangan konflik pejalan kaki oleh *separasi*²³ baik horizontal maupun vertikal. Separasi horizontal dapat terpenuhi oleh suatu daerah khusus pejalan kaki, sedangkan separasi vertikal dapat dicapai melalui jembatan penyeberangan.

2). *Keamanan pejalan kaki*

Bangunan dan jalan harus diatur untuk meningkatkan pengamatan yang bersih oleh pejalan kaki dan personil penjaga ketertiban. Peningkatan pencahayaan, peniadaan penghalang, serta menghindari adanya pembangunan atau penanaman yang tidak teratur akan membantu sasaran peningkatan keselamatan bagi pejalan kaki.

3). *Kenyamanan pejalan kaki*

Kenyamanan pejalan kaki dari penghalang seperti pedagang kaki lima, bis surat, telepon umum, tong sampah, serta penanaman harus diperhatikan. Kenyamanan bagi pejalan kaki yang cacat jasmani dan orang yang membawa kereta bayi yang memiliki kesulitan akses yang tinggi juga harus diperhatikan, misalnya dengan memberikan area untuk istirahat.

4). *Kesinambungan*

Hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah kesinambungan arus bagi pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya.

5). *Pertalian*

Hubungan antara fungsional dan visual merupakan unsur penting dalam mendesain sarana bagi pejalan kaki.

6). *Daya pikat*

Pertamanan dan pemberian warna pada trotoar akan meningkatkan variasi visual dari suatu kota. Peluang untuk memberikan unsur-unsur kejutan melalui pemandangan indah tidak boleh dilewatkan. (*Donald Watson et al.- dalam Time - Saver Standards for Urban Design, 2003*).

Dari beberapa uraian di atas mengenai permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas informal dari para PKL, sepertinya perlu dilakukan suatu cara yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan, yaitu dengan melakukan relokasi terhadap para PKL tersebut.

II.6 RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Walikota Resmikan PKL Trade Center Otista dan Baranangsian merupakan judul sebuah wacana yang menceritakan upaya pemerintah Kota Bandung dalam menertibkan PKL yang ada di Kotanya. Pemerintah Kota Bandung memandang perlu setiap pelaku ekonomi memahami dan berbuat bersama-sama untuk menyikapi salah satu kesulitan penataan ekonomi kota yaitu penataan kegiatan usaha sektor informal kecil atau PKL. Sejauh ini relokasi dinilai sebagai solusi yang paling tepat, karena selain menciptakan ketertiban, keindahan, dan kebersihan, juga memudahkan masyarakat konsumen pada sentra - sentra distribusi yang

pada gilirannya mampu memangkas pembiayaan yang tidak kecil. Dengan diresmikannya gedung eks pertokoan Ria sebagai Trade Center, Pemerintah Kota Bandung berharap tidak ada lagi alasan untuk meminta dispensasi untuk melakukan kegiatan di tujuh titik. CV. Usaha Mandiri mendapat kepercayaan menangani pelaksanaan relokasi ke PKL Trade Center Tegalega dan Baranngasian ini. Adapun jumlah kios untuk lokasi Tegalega dan Baranngasian sekitar 1.500 kios dilengkapi dengan fasilitas umum antara lain mushola, fasilitas olahraga, WC umum, serta hiburan parkir (www.bandung.go.id/berita/fullnews.php?id=111).

II.7 KESIMPULAN

Dari kajian teori di atas, maka dapat diketahui motivasi munculnya pedagang kaki lima, hubungannya dengan aktivitas formal yang ada di ruang jalan, serta dampak yang ditimbulkan pada ruang terbuka kota seperti taman kota, alun-alun, maupun ruang jalan itu sendiri. Untuk itu diperlukan teori mengenai "perilaku", seperti cara membaca perilaku seseorang dan perancangan suatu kawasan berdasarkan perilaku agar dapat mengkaji lebih dalam tentang perilaku, baik perilaku PKL maupun pengunjung yang terjadi di suatu kawasan. Dari teori yang didapat, diketahui pula bahwa relokasi merupakan salah satu jalan terbaik untuk mengatasi permasalahan PKL tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan pada teori di atas bahwa permasalahan PKL di kawasan alun-alun Cilacap dalam konteks urban juga mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi, yakni aspek legal,

aspek ekonomi, dan aspek fisik. Dan *akses masuk kawasan* menjadi faktor utama yang mempengaruhi posisi mangkal para PKL tersebut, sehingga kondisi ini menimbulkan permasalahan baru bagi kondisi ruang jalan di sekitarnya.

Sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan di depan bahwa *relokasi* menjadi pilihan untuk upaya penataan PKL di kawasan alun-alun Cilacap. Akan tetapi sebelumnya perlu diketahui landasan yang harus ditetapkan dalam perencanaan dan perancangan sebuah kawasan, yaitu:

- 1). Kebutuhan dari owner, dalam kasus penelitian ini yakni PKL dan pengunjung.
- 2). Aturan pengarah dari pemerintah yang berupa RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) Cilacap Tahun 2004 - 2014 sebagai Perda. No. 7 Tahun 2004 dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sebagai Perda No. 6 Tahun 2004.

Dan untuk dapat mengetahui kebutuhan dari pengguna atau pelaku dalam hal ini adalah PKL dan pengunjung, maka harus dilakukan beberapa hal, diantaranya:

- 1). Mendalami pola perilaku
- 2). Aktivitas yang terjadi dan dilakukan

Dari aktivitas yang dilakukan PKL dan pengunjung maka dapat diketahui sarana-sarana apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk membantu atau mempermudah aktivitas yang mereka lakukan.

Dalam melakukan observasi mengenai perilaku PKL dan pengunjung ini akan digunakan 2 teknik observasi, yaitu:

1). *Teknik observasi saja*

Untuk mengetahui data - data mengenai jumlah PKL berdasarkan komoditi barang dagangan dan data pola sebaran PKL yang ada di kawasan alun - alun Cilacap. Pada teknik ini tidak terjadi interaksi dengan responden. Dipilih teknik ini karena data yang dicari cukup luas wilayahnya dan memakan banyak waktu, selain itu data hanya berupa penghitungan dan pemetaan sebaran PKL sehingga tidak memerlukan interaksi dengan responden.

2). *Teknik partisipasi terbatas*

Untuk mendapatkan data seperti data pembagian waktu operasional PKL. Dalam hal ini diperlukan adanya sedikit interaksi dengan responden untuk memperjelas data seperti alasan perubahan waktu operasional.

Dalam menentukan lahan untuk relokasi akan digunakan kriteria-kriteria sebagai pertimbangan, yaitu:

1). *Pewilayahan (zoning)*

Apakah lahan sesuai dengan tata guna lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

2). *Lokasi*

Apakah lokasi dari lahan mudah untuk diakses.

3). *Komunitas*

Dapatkan bangunan yang akan didirikan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya.